# BAB II

# KAJIAN TEORI

## A. Landasar Teori

### 1. Teori Ekonomi

Ekonomi atau *economic* dalam banyak literature ekonomi disebutkan berasal dari bahasa Yunani yaitu kata "*Oios atau Oiuku*" dan "*Nomos*" yang berarti peraturan rumah tangga. Dengan kata lain pengertian ekonomi adalah semua yang menyangkut hal-hal yang berhubungan dengan perikehidupan. Teori ekonomi didasarkan pada kondisi nyata yang terjadi pada masyarat yang disederhanakan terutama mengenai sifat-sifat yang berhubungan ekonomi.

Menurut Sadano Sukirno yang ditulis dalam buku Iskandar Putong (2005), bahwa ilmu ekonomi adalah menganalisis biaya dan keuangan dan memperbaiki corak penggunaan sumber-sumber daya" (maksudnya sumber daya adalah sumber daya alam dan sumber daya manusia).[22]

[22] Iskandar Putong, *Teori Ekonomi Mikro* (Jakarta: Mitra Wancana Media, 2005), 9-13

## 2. Teori Ekonomi Pembangunan

Menurut Arsyad yang ditulis dalam buku Subandi (2012), mendefinisikan ekonomi pembangunan sebagai suatu cabang ilmu ekonomi yang menganalisa masalah-masalah yang dihadapi oleh Negara sedang berembang dan mencari cara-cara untuk mengatasi masalah-masalah itu agar Negara-negara tersebut dapat membangun ekonominya lebih cepat lagi.[23]

Dalam buku Ahmad Mahyudi (2004) ekonomi pembangunan adalah suatu cabang ilmu dari ilmu ekonomi yang bertujuan menganalisis masalah-masalah yang dihadapi dan memperoleh cara/metode penyelesaian dalam pembanguna ekonomi, terutama di Negara-negara berkembang, agar pembangunan ekonomi menjadi lebih cepat dan harmonis. Dalam ilmu ekonomi, analisis dan metode pembangunan berkaitan atau menyangkut dengan aspek-aspek di luar bidang ekonomi, seperti masalah kemiskinan,

[23] Subandi, *Ekonomi Pembangunan* (Bandung: Alfa Beta, 2012), 9

penganggguran, ketidakmerataan ekonomi, kependudukan dan masalah pendidikan, social, budaya, politik, serta lingkungan.

Pembangunan ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi yang dapat menyebabkan perubahan-perubahan, terutama terjadi perubahan menurunnya tingkat pertumbuhan penduduk dan perubahan dari struktur ekonomi, baik peranannya terhadap pembentukan pendapatan nasional, maupun peranannya dalam penyedian lapangan kerja.[24]

Menurut Subandi (2012) Pembangunan ekonomi adalah suatu rangkaian proses kegiatan yang dilakukan oleh suatu Negara untuk mengembangkan kegiatan atau aktifitas ekonomi untuk meningkatkan taraf hidup/kemakmuran (*Income per-kapita*) dalam jangka panjang. Pada dasarnya dalam pembangunan ekonomi memiliki dua sifat yaitu yang pertama bersifat deskriptif analitis dan kedua bersifat pilihan kebijakan.

Adam Smith dalam teori pembangunan ekonomi membagi masa atau tahapan dalam lima tahap, yaitu:

a. Tahap berburu

[24] Akhmad Mahyudi, *Ekonomi Pembangunan dan Analisi Data* Empiris (Bogor: Ghalia Indonesia, 2004), 1

b. Tahap berternak

c. Tahap bercocok tanam

d. Tahap berdagang

e. Tahap industrialisasi

Tahap pembangunan Adam Smith lebih menekankan faktor produksi modal dan pemilih modal (kapitalis), karena pemilik modal mampu mengakumulasi modal yang diperoleh dari laba atau keuntungan usaha untuk kemudian ditanamkan kembali sebagai perluasan atau tambahan produksi dan kapasitas produksi perusahaan.

Sedangkan menurut teori Arthur Lewis yang dikutip dalam buku Akhmad Mahyudi (2004) pembangunan ekonomi terbagi menjadi dua perekonomian yaitu, perekonomian industri dan perekonomian tradisional.[25]

Tahap-Tahap Pembangunan Ekonomi W.W. ROSTOW :

1. Tahap Masyarakat Tradisional
2. Tahap Prasyarat Lepas Landas

[25] Akhmad Mahyudi, *Ekonomi Pembangunan dan Analisi Data* Empiris (Bogor: Ghalia Indonesia, 2004), 165-166

3. Tahap Lepas Landas dan Sesudahnya.[26]

**3. Pembangunan Ekonomi Daerah**

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah dan masyarakatnya mengelola sumber daya-sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan Ekonomi) dalam wilayah tersebut.

Dalam pembangunan ekonomi daerah yang menjadi pokok permasalahannya adalah terletak pada kebijakan-kebijakan pembangunan yang didasarkan pada kehasan daerah yang bersangkutan (*endogenous*) dengan menggunakan potensi sumber daya manusia, kelembagaan, dan sumber daya fisik secara lokal (daerah). Orientasi ini mengarah pada pengambilan insiatif-insiatif yang berasal dari daerah tersebut dalam proses pembangunan untuk menciptakan kesempatan kerja baru dan merangsang peningkatan kegiatan ekonomi.

---

[26] Akhmad Mahyudi, *Ekonomi Pembangunan dan Analisi Data* Empiris (Bogor: Ghalia Indonesia, 2004), 200-202

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses yang mencangkup pembentukan institusi-institusi baru, pembangunan industri-industri alternatif, perbaikan kapasitas tenaga kerja yang ada untuk menghasilkan produk dan jasa yang lebih baik, identifikasi pasar-pasar baru, beralih pengetahuan dan teologi, serta pengembangan usaha-usaha baru.

Tujuan utama dari setiap pembangunan ekonomi daerah adalah untuk meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja untuk masyarakat daerah. Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah daerah dan masyarakatnya harus secara bersama-sama mengambilan inisiatif pembanguna daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah dengan partisipasi masyarakat, dengan dukungan sumber daya yang ada harus mampu menghitung potensi sumber daya-sumber daya yang diperlukan untuk merancang dan membangun ekonomi daerahnya.[27]

[27] Subandi, *Ekonomi Pembangunan* (Bandung: Alfa Beta, 2012), 133-134

**4. Teori Ketimpangan**

Ketimpanga pembangunan antara wilayah merupakan aspek yag umum terjadi dalam kegiatan ekonomi suatu daerah. Ketimpangan ini pada dasarnya disebabkan oleh adanya perbedaan kandungan sumberdaya alam dam perbedaan kondisi demografi yang terdapat pada masing-masing wilayah. Akibat dari perbedaan ini, kemampuan suatu daerah dalam mendorong suatu proses pembangunan juga menjadi berbeda. Hal ini, tidaklah mengherankan bilamana disetiap daerah biasanya terdapat wilayah maju *(Developed Ragion)* dan wilayah terbelakang *(Underdeveloped Ragion)*.[28]

Budi Warno (2012) ketimpangan merupakan akibat dari kegagalan pembangunan di era globalisasi untuk memenuhi kebutuhan fisik dan psikis warga masyarakat.

[28]Sjafrizal, *Ekonomi Regional, Teori Dan Aplikasi* (Padang: Baduose Media, 2008), 104

Roichatul Awidah (2012) ketimpangan sosial sering dipandang sebagai dampak residual dari proses pertumbuhan ekonomi.[29]

Ketidakmerataan adalah hasil dari proses investasi yang bermula pada suatu sektor atau wilayah dengan demikian sektor atau wilayah yang besangkutan tentulah akan tumbuh lebih baik dibandingkan dengan sektor atau wilayah yang lain.[30]

Secara teoritis, permasalahan ketimpangan pembangunan antara wilayah mula-mula dimunculkan oleh *Douglas C North* dalam analisisnya tentang teori pertumbuhan Neo-Klasik. Dalam teori tersebut dimunculkan sebuah prediksi tentang hubungan antara tingkat pembangunan ekonomi nasional suatu negara dengan ketimpangan pembangunan antara wilayah. Hipotesis ini kemudian lazim dikenal sebagai Hipotesa Neo-klasik yang menarik perhatian para ekonomi dan perecanaan pembangunan daerah.

---

[29]Meripaldi Somniator, ”Ketimpangan Pembangunan Daerah, ”*http://meripaldiperbandingan/2012.blogspot.co.id/?m=1 (*diunduh tanggal 24 Agustus 2017)

[30] Nununk Dwi Retnandari, *Pengantar Ekonomi Dalam Kebijakan Publik* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), 158

Hipotesa Neo-klasik pada permulaan proses pembangunan suatu negara, ketimpangan pembangunan antara wilayah cenderung meningkat. Proses ini akan terjadi sampai ketimpangan tersebut mencapai titik puncak. Setelah itu bila proses pembangunan terus berlanjut, maka secara berangsur-angsur ketimpangan pembangunan antara wilayah tersebut akan menurun. Berdasarkan hipotesa ini, dapat ditarik suatu kesimpulan sementara bahwa pada negara-negara sedang berkembang umumnya ketimpangan pembangunan antara wilayah cenderung lebih tinggi, sedangkan pada negara maju ketimpangan tersebut akan menjadi lebih rendah. Dengan kata lain, kurva ketimpangan pembangunan antar wilayah adalah berbentuk huruf U terbalik *(Reverse U-shape Curve).*

**Gambar 2.1**
**Kurva Kuznet**

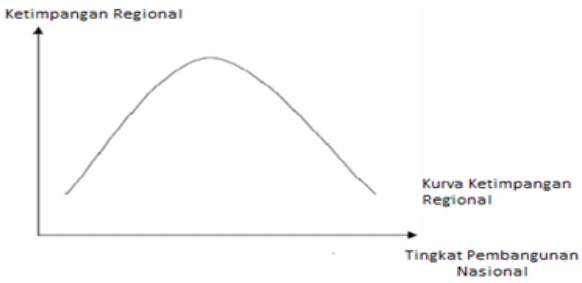


**Sumber: Sjafrizal : 2008**

Melihat ketimpangan pembangunan antar wilayah dalam suatu Negara atau suatu daerah bukanlah hal yang mudah karena hal ini dapat menimbulkan debat yang berkepanjangan. Adakalanya masyarakat berpendapat bahwa ketimpangan suatu daerah cukup tinggi setelah melihat banyak kelompok miskin pada daerah bersangkutan. Akan tetapi ada pula masyarakat merasakan adanya ketimpangan yang cukup tinggi setelah melihat adanya segelintir kelompok kaya ditengah-tengah masyarakat yang umumnya masih miskin. Berbeda dengan distribusi pendapatan yang melihat ketimpangan antar kelompok masyarakat, ketimpangan pembangunan antar wilayah melihat perbedaan antar wilayah. Hal yang dipersoalkan disini bukan antara kelompok kaya dan kelompok miskin, tetapi adalah perbedaan antara daerah maju dan daerah terbelakang.[31]

[31]Sjafrizal, *Ekonomi Regional, Teori Dan Aplikasi* (Padang: Baduose Media, 2008), 105-107

**5. Ukuran Ketimpangan Pembangunan antara wilayah**

**a. Indeks Wiliamson**

Ukuran ketimpangan pembangunan antara wilayah yang mula-mula ditemukan adalah *Wiliamson Index* yang digunakam dalam studinya pada tahun 1996. Secara Ilmu Statistik, indeks ini sebenarnya adalah *coefficient of variation* yang lazin digunakan untuk mengukur suatu perbedaan. Istilah *Wiliamson Index* muncul sebagai penghargaan kepada Jeffrey G. Wiliamson yang mula-mula menggunakan teknik ini untuk mengukur ketimpangan pembangunan antara wilayah.[32]

Berbeda dengan Gini Rasio yang lazim digunakan dalam mengukur distribusi pendapatan, *Wiliamson Index* menggunakan Produk Domestik Bruto (PDRB) perkapita sebagai data dasar. Alasannya jelas karena yang diperbandingkan adalah tingkat pembangunan wilayah dan bukan tingkat kemakmuran antara kelompok. Dengan demikian, formulasi Indeks Wiliamson ini secara statistik dapat ditampilkan sebagai berikut :

---

[32] Sjafrizal, *Ekonomi Wilayah dan Perkotaan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), 110

$$Iw = \frac{\sqrt{\sum_{i=1}^{n}(yi-y)^2(\frac{fi}{n})}}{y} \quad 0 < V_w < 1 \ldots\ldots\ldots..(2.1)$$

Keterangan:

Iw = Indeks Williamson
yi = PDRB per kapita (dalam penelitian ini adalah kabupaten/kota)
y = PDRB per kapita (provinsi)
fi = jumlah penduduk (dalam penelitian ini adalah kabupaten/kota)
n = jumlah penduduk (provinsi)

Kriteria nilai Iw = 0 sampai dengan 1 apabila nilai:

Subskrip W digunakan karena formulasi yang digunakan adalah secara tertimbang sehingga indeks tersebut dapat dibandingkan denagan negara atau daerah lainnya. Sedangkan pengertian indeks ini adalah sebagai berikut: bila $V_w$ mendekati 1 berarti sangat timpang dan bila $V_w$ mendekati nol berarti sangat merata.[33]

***b. Theil Index***

*Theil Index* sebagaimana digunakan oleh Atika dan Alisyahbana dalam studinya yang dilakukan di Indonesia. Sedangkan data yang diperlukan untuk mengukur indeks ini

[33]Sjafrizal, *Ekonomi Wilayah dan Perkotaan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), 110

adalah sama dengan yang diperlukan untuk menghitung *Williamson Index* yaitu PDRB perkapita untuk setiap wilayah dan jumlah penduduk. Dengan demikian pula halnya dengan penafsirannya yang juga sama yaitu bila indeks mendekati 1 artinya sangat timpang dan sebaliknya bila indeks mendekati 0 yang berarti sangat merata.

Namun demikian, penggunaan *Theil Index* sebagai ukuran ketimpangan mempunyai kelebihan tertentu. Pertama, indeks ini dapat menghitung ketimpangan dalam daerah dan antara daerah secara sekaligus, sehingga cangkup analisa menjadi lebih luas. Dalam kasus Indonesia, dengan menggunakan metode ini dapat dihitung ketimpangan dalam Provinsi dan Kabupaten/Kota serta antara Provinsi, Kabupaten dan Kota. Kedua, dengan menggunakan indeks ini dapat pula dihutung konstribusi (dalam presentase) masing-masing daerah terhadap ketimpangan pembangunan wilayah secara

keseluruhan sehingga dapat memberikan implikasi kebijakan cukup penting.[34]

**c. Kurva Lorenz**

Kurva Lorenz diambil dari nama seorang ahli statistik dari Amerika Serikat bernama Conrad Lorenz yang memperkenalkan kurva tersebut pertama kali pada tahun 1905, dimana dia menggambarkan hubungan antara kelompok-kelompok penduduk dengan pangsa pendapatan mereka.

Kurva Lorenz berbetuk bujur sangkar, dimana jumlah pendapatan digambarkan pada sumbu horizontal (BC) tidak dalam angka mutlak, tetapi dalam presentase relative. Sedangkan sumbu vertical (AB) menujukkan pangsa (share) pendapatan nasional yang diterima oleh masing-masing presentase jumlah penduduk. Kemudian garis diagonal (kemerataan sempurna) digambarkan melalui titik orogin menuju sudut kanan atas (BD) dari bujur sangkar tersebut.

[34]Sjafrizal, *Ekonomi Regional, Teori Dan Aplikasi* (Padang: Baduose Media, 2008), 109

**Gambar 2.2**
**Kurva Lorenz**

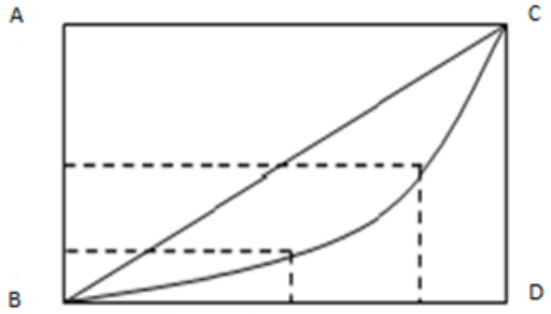


**Sumber : Subandi : 2012**

Kurva rolenz menunjukkan hubungan kuantitatif antara presentase penduduk dengan presentase pendapatan yang diterima dalam kurun waktu tertetu misal dalam waktu satu tahun. Semakin jauh kurva Lorenz dari garis diagonal (kemerataan sempurna), semakin tinggi derajat ketidakmerataan yang dialami oleh penduduk dalam suatu Negara. Apabila kurva Lorenz makin mendekati garis diagonal makin semakin rendah derajat ketidakmerataannya.[35]

**d. Koefisien Gini**

Koefisien Gini diambil dari nama ahli statistik Italia yang bernama C. Gini yang menemukan rumus tersebut pada tahun 1912. Koefisien Gini merupakan kelanjutan dari kurva

[35] Subandi, *Ekonomi Pembangunan* (Bandung: Alfabeta, 2012), 73-74

Lorenz. Dimana untuk menghitung ketidakmerataan distribusi pendapatan dalam suatu Negara diperoleh dengan menghitung luas daerah antara garis diagonal dengan kurva lorenz dibandingkan dengan luas total dari setengah bujur sangkar di mana kurva Lorenz tersebut berada.

Klasifikasi kemerataan berdasarkan koefesien gini merupakan ukuran ketidakmerataan agregat yang memiliki nilai antara 0 (kemerataan sempurna) sampai dengan 1 (ketidakmerataan sempurna) bila nilai K dari suatu negara berkisar antara 0,50 - 0,70 berarti ketidakmerataan tinggi, bila KG berkisar 0,36 - 0,49 berarti ketidakmerataan sedang, dan bila KG berkisar 0,20 - 0,35 berarti ketidakmerataan rendah.[36]

**6. Faktor-faktor Yang Menyebabkan Ketimpangan Pembanguna Antara Wilayah**

**a. Perbedaan Kandungan Sumberdaya Alam**

Penyebab pertama yang mendorong timbulnya ketimpangan pembangunan antara wilayah adalah adanya perbedaan yang sangat besar dalam kandungan sumberdaya alam pada masing-masing negara. Sebagaiman diketahui

[36]Subandi, *Ekonomi Pembangunan* (Bandung: Alfabeta, 2012), 75

bahwa perbedaan kandungan sumberdaya alam ini di Indonesia ternyata sangat cukup besar. Ada daerah mempunyai minyak dan gas, tetapi daeah lain tidak mempunyai. Ada daerah mempunyai deposit batu bara yang cukup besar, tetapi daerah lain tidak ada. Demikian pula halnya dengan tingkat kesuburan lahan yang juga sangat bervariasi sehingga mempengaruhi upaya untuk medorong pembangunan pertanian pada masing-masing daerah.

**b. Perbedaan Kondisi Demografis**

Kondisi demografis ini akan dapat mempegaruhi ketimpangan pembangunan antara wilayah karena hal ini akan berpengaruh terhadap produktifitas kerja masyarakat pada daerah yang besangkutan. Daerah dengan kondisi demografis yang baik akan cenderung akam mempunyai produktivitas kerja yang lebih tinggi sehingga hal ini akan mendorong peningkat investasi yang selanjutnya akan meningkatkan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi daerah bersangkutan. Sebaliknya, bila pada suatu daerah tertentu kondisi demografisnya kurang baik maka hal ini akan

menyebabkan relatif rendahnya produktifitas kerja masyarakat setempat yang menimbulkan kondisi yang kurang menarik bagi penanaman modal sehingga pertumbuhan ekonomi bersangkutan akan menjadi lebih rendah.[37]

**c. Kurang Lancarnya Mobilitas Barang Dan Jasa**

Kurangnya mobilitas barang dan jasa dapat pula mendorong terjadinya peningkatn ketimpangan pembangunan wilayah. Mobilitas barang dan jasa ini meliputi kegiatan perdagangan antara daerah dan migrasi baik yang disponsori pemerintah (transmigrasi) atau migrasi spontan.

**d. Konsentrasi Kegiatan Ekonomi Wilayah**

Terjadinya konsentrasi kegiatan ekonomi yang cukup tinggi pada wilayah tertentu jelas akan mempengaruhi ketimpangan pembangunan antara wilayah. Pertumbuhan ekonomi daerah akan cenderung lebih cepat pada daerah dimana terdapat konsentrasi kegiatan ekonomi yang cukup besar. Kondisi tersebut selanjutnya akan mendorong proses pembangunan daerah melalui peningkatan penyedian lapangan

---

[37] Sjafrizal, *Ekonomi Regional, Teori Dan Aplikasi* (Padang: Baduose Media, 2008), 117-118

kerja dan tingkat pendapatan masyarakat. Demikian pula sebaliknya bilamana, konstrasi kegiatan ekonomi pada suatu daerah relative rendah yang selanjutnya juga mendorong terjadi pengangguran dan rendahnya tingkat pendapatan masyarakat setempat.

**e. Alokasi Dana Pembangunan Antara Wilayah**

Tidak dapat disangkal bahwa investasi merupakan salah satu yang sangat menentukan pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Karena itu, daerah yang dapat alokasi investasi yang lebih besar dari pemerintah, atau dapat menarikn lebih banyak investasi swasta akan cenderung mempunyai tingkat pertumbuhan ekonomi daerah lebih cepat. Kondisi ini tentunya akan mendorong proses pembangunan daerah melalui penyediaan lapangan kerja lebih banyak. Demikian pula sebaliknya terjadi bilamana investasi pemerintahan dan swasta yang masuk kesatu daerah ternyata lebih rendah.[38]

[38] Sjafrizal, *Ekonomi Regional, Teori Dan Aplikasi* (Padang: Baduose Media, 2008), 119-120

Penyebab ketidakmerataan distribusi pendapatan di NSB, menurut Irma Adelman dan Cynthina Taft Morris yang ditulis dalam buku Sjafrizal (2008) ada delapan sebab yaitu:

1. Pertambahan penduduk yang tinggi mengakibatkan menurunya perkapita.
2. Inflasi, di mana pendapatan uang bertambah tetapi tidak diikuti secara proporsional dengan pertambahan produksi barang-barang.
3. Ketidak merataan pembangunan daerah.
4. Investasi yang sangat banyak dalam proyek-proyak yang padat modal *(capital intensive)*, sehingga persentase pendpatan modal dari harta tambahan lebih besar dibandingkan dengan presentase pendapatan yang berasal dari kerja, sehingga pengangguran bertambah.
5. Rendahnya mobilitas sosial.
6. Pelaksanaan kebijakan industri substitusi impor yang mengakibatkan kenaikan harga-harga barang hasil industi adalah usaha untuk usaha-usaha golongan kapitalis.

7. Memburuknya nilai tukar *(tern of trade)* bagi NSB dalam perdagangan dengan negara-negara terhadap barang-baraang ekspor NSB.
8. Hancurnya indutri-industri kerajinan rakyat seperti pertukangan, industri rumah tangga, dan lain-lain.[39]

Adapun salah satu penyebab ketimpangan yang terjadi adalah adanya kesenjangan antara pertumbuhan investasi yang menggunakan teknologi dengan kemampuan sumber daya manusianya. Meraka yang percaya bahwa ketimpanagan disebabkan oleh faktor eksternal menyatakan bahwa harus ada reformasi atau penataan ulang mengenai hubungan internasional.[40]

**7. Teori Pertumbuhan**

Menurut Sadono Sukirno (2006) pertumbuhan ekonomi adalah sebagai suatu ukuran kuantitatif yang menggambarkan

---

[39]Sjafrizal, *Ekonomi Regional, Teori Dan Aplikasi* (Padang: Baduose Media, 2008), 72

[40] Nunung Dwi Retnandari, *Pengantar Ilmu Ekonomi Dalam Kebijakan Publik* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), 160

perkembangan suatu perekonomian dalam satu tahun tertentu apaila dibandingkan dengan tahun sebelumnya.[41]

Sedangkan Menurut Arsyad Lincolin (2010) pertumbuhan ekonomi adalah sebagai kenaikan GDP atau GNP tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk, dan apakah terjadi perubahan struktur ekonomi atau perbaikan system kelembagaan atau tidak.[42] Pertumbuhan ekonomi ini diukur dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan laju pertumbuhannya atas dasar harga konstan.

$$\text{Pertumbuhan Ekonomi} = \frac{PDRBt - PDRBt-1}{PDRBt-1} \times 100 \quad ...(2.4)$$

Keterangan :

$PDRB_t$ : Produk Domestik Bruto tahun t

$PDRB_{t-1}$ : Produk Domestik Regional Bruto pada tahun t-1[43]

Prof. Simon Kuznets dalam kuliahnya pada Peringatan Nobel mendefinisikan pertumbuhan ekonomi sebagai

---

[41] Sadono Sukirno, *Ekonomi Pembangunan, Proses, Masalah, dan Dasar Kebijakan* (Jakarta: Kencana, 2006), 9

[42] Arsyad Lincolin, *Ekonomi Pembangunan* (Yogyakarta: Unit Penerbit Dan Percetakan STIM YKPN, 2010), 12

[43] Lili Masli, *Analisis Faktor-faktoor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi Dan Ketimpangan Ragioonal Antar Kapubaten Atau Kota Di Provinsis Jawa Barat* (2008), 6

"kenaikan jangka panjang dalam kemampuan suatu Negara untuk menyediakan sebanyak jenis barang-barang ekonomi kepada penduduknya, kemampuan ini tumbuh sesuai dengan kemajuan teknologi, dan penyesuaian kelembagaan dan ideologis yang diperlukannya.[44]

Menurut Lincoln Arsyad (2010) ada empat faktor utama yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu masyarakat (negara) yaitu :

1. Akumulasi Modal

   Akumulasi modal akan terjadi jika ada bagian dari pendapatan pada masa sekarang yang ditabung dan kemudian diinvestasikan untuk dapat memperbesar *output* pada masa yang akan datang.

2. Pertumbuhan penduduk

   Pertumbuhan penduduk dan hal - hal yang berhubungan dengan kenaikan jumlah angkatan kerja (*labor Force*) secara tradisional dianggap sebagai faktor yang positif dalam merangsang pertumbuhan ekonomi.

---

[44] Jhingan, *Ekonomi Pembangunan Dan Perencanaan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 57

3. Kemajuan Teknologi

Menurut para ekonom, kemajuan teknologi merupkan yang paling penting bagi pertumbuhan ekonomi. Dalam bentuknya paling sederhana. Kemajuan teknologi disebabkan oleh adanya cara-cara baru atau mungkin cara-cara lama yang diperbaiki dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan tradisional.

4. Sumber Daya institusi (sistem kelembagaan)

Menurut Dougles C. North (1991) – pemenang Nobel Ekonomi 1993 – anggapan sebagian besar ekonom arus utama (*mainstream*) selama ini bahwa mekanisme pasar merupakan penggerak utama perekonomian dan menafikkan peran institusi adalah keliru. Menurut North peran institusi dalam pertumbuhan dan pembangunan ekonomi sangat sentral.[45]

**a. Model Neo-klasik**

Model ini dipelopori oleh George H. Bort dengan mendasarkan analisisnya pada teori ekonomi Neo-Klasik.

[45] Arsyad Lincolin, *Ekonomi Pembangunan* (Yogyakarta: Unit Penerbit Dan Percetakan STIM YKPN, 2010), 269-276

Menurut model ini, pertumbuhan ekonomi suatu daerah akan sangat ditentukan oleh kemampuan daerah tersebut untuk meningkatkan kegiatan produksinya. Sedangkan kegiatan produksi pada suatu daerah tidak hanya ditentukan oleh potensi daerah yang bersangkuatan, tetapi juga ditentukan pula oleh mobilitas tenaga kerja dan mobilitas modal antara daerah.

Karena kunci utama pertumbuhan ekonomi daerah adalah peningkatan kegiatan produksi, maka mengikuti Richardson, Model Neo-Klasik ini dapat diformulasikan mulai dari fungsi produksi adalah dalam bentuk *Cobb-Douglas*, maka dapat di tulis:

$$Y = A\,K^{\alpha}\,L^{\beta} \qquad , \alpha + \beta = 1$$

Dimana Y melambangkan PDRB, K dan L masing-masingnya adalah modal dan tenaga kerja. Karena analisa menyangkut pertumbuhan maka semua variabel di anggap adalah fungsi waktu (t). Dengan mengambil turunan matematika persamaaan terhada variabel t diperoleh:

$$y = a + \alpha\, k + (1 - \alpha)\, l$$

Dimana y = dY/dt menunjukan perubahan teknologi produksi (secara netral), K = dK/dt menunjukkan penambahan modal (investasi) dan l = dL/dt menunjukkan penambahan jumlah dan peningkatan kualitas kerja. Kesimpulan pertama yang sangat penting dari model Neo-Klasik yaitu pertumbuhan ekonomi suatu daerah ditentukan oleh 3 faktor utama, yaitu kemajuan teknologi (a), penambahan modal atau investasi (k) dan peningkatan jumlah dan kualitas tenaga kerja (l).

Selanjutnya, bila aspek daerah dimasukkan kedalam analisa ini, maka peningkatan modal di suatu daerah itu saja, tetapi juga berasal dari modal yang masuk dari luar daerah. Keyataan ini dapat di formulasikan sebagai berikut:

$$k_i = (si/vi) + \sum_{j=1}^{n} kji$$

Dimana $s_i$ adalah marginal Propensity to Save (MPS) di daerah I, $v_i$adalah Incremental Capital Ratio (ICOR) daerah I, sedangkan $k_{j\ i}$ adalah jumlah modal yang masuk dari daerah lain ke daerah i.[46]

[46] Sjafrizal, *Ekonomi Wilayah dan Perkotaan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), 99

Analog dengan hal ini, maka peningkatan jumlah tenaga kerja i tidak saja disebabkan karena pertambahan penduduk daerah yang bersangkutan saja, ($n_i$), tetapi juga karena arus perpindahan penduduk masuk (innigration) ke derah yang bersangkutan. Kenyataan ini dapat diformulasikan sebagai berikut;

$$l_i = n_i + \sum_{j=1}^{n} mji$$

Dimana $m_{j\ i}$ adalah penduduk yang masuk (inmigration) ke daerah I yang datang dari daerah lainnya j.

Pemindahan modal, $k_{j\ I}$, dari daerah j ke I terutama didorong oleh tingkat pengambilan modal, r, yag tinggi di daerah I dibandingkan daerah j. demikian pula halnya dengan perpindahan penduduk yang terjadi karena perbedaan tingkat upah, w. berdasarkan hal ini, dapat ditulis bahwa:

$$k_{j\ i} = f_k\,(r_i - r_j)$$

$$m_{j\ i} = f_{i\ (}wi - wj)$$

Dalam hal ini penganut Model Neo-Klasik beranggapan bahwa mobilitas faktor produksi, baik modal maupun tenaga kerja, pada permulaan proses pembangunan adalah kurang

lancar. Akibatnya, pada saat itu modal dan tenaga kerja ahli cenderung terkonsentrasi di daerah yang lebih maju sehingga ketimpangan pembangunan ragional cenderung melebar (*Divergence*). Akan tetapi proses pembangunan terus berlanjut, dengan sebaiknya prasarana dan fasilitas komunikasi, maka mobilitas modal dan tenaga kerja tersebut akan semakin lancar. Dengan demikian, nantinya setalah negara yang bersangkutan telah maju, maka ketimpangan pembangunan ragional akan berkurang (*Convergence*). Perkirain ini merupakan kesimpulan kedua dari model ini dan kemudian dikenal sebagai Hipotesa Neo-Klasik.[47]

**8. Teori Investasi**

Investasi adalah keputusan menunda konsumsi sumber daya atau bagian penghasilan demi meningkatkan kemampuan menambah atau menciptakan nilai hidup (penghasilan dan atau kekayaan) di masa mendatang.[48]

---

[47] Sjafrizal, *Ekonomi Wilayah dan Perkotaan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), 100

[48] Prathama Rahardja Mandala Manurungun, *Pengatar Ekonomi, Mikroekonomi dan Makroekonomi* (Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2008), 269

Pengertian dari investasi swasta/penanaman modal menurut Undang-Undang Republik Indonesia No.25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.[49]

Investasi merupakan salah satu sumber dana pembangunan yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Adanya akumulasi modal dapat memungkinkan meningkatnya output dan pendapatan di masa yang akan datang sehingga akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Investasi akan mengalir ke wilayah dengan *rate of return* yang tinggi serta memilki sarana dan prasarana yang memadai, sehingga investasi akan terkonsentrasi ke wilayah dengan kriteria tersebut.

Penyebaran investasi swasta yang berupa penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing antar daerah

[49]Ni'matus Sholikhah, "*Jurnal Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Penanaman Modal dan Tingkat Pendidikan Terhadap Disparitas Pendapatan Di Provinsi Jawa Timur*", (2011)

berbeda yang disebabkan ketersediaan fasilitas/saran dan prasarana di daerah. Dengan demikian tidak mengherankan bila keberhasilan pembangunan juga berbeda-beda antar daerah. Persebaran kegiatan penanaman modal yang tidak merata menyebabkan perputaran kegiatan penanaman modal yang tidak merata menyebabkan perputaran kegiatan ekonomi dan peningkatan kemakmuran penduduk antar daerah menjadi tidak seimbang.[50] Tidak dapat disangkal bahwa investasi merupakan salah satu yang sangat menentukan pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Hal ini, daerah yang dapat alokasi investasi yang lebih besar dari pemerintah, atau dapat menarik lebih banyak investasi swasta akan cenderung mempunyai tingkat pertumbuhan ekonomi daerah lebih cepat. Kondisi ini tentunya akan dapat pula mendorong proses pembangunan daerah melalui penyediaan lapangan kerja yang lebih banyak dan tingkat pendapatan perkapita yang tinggi. Demikian pula

[50] Prabowo Siswanto, " *Analisis Dampak Perdagangan Bebas Terhadap Ketimpangan Pembangunan Wilayah: Studi Kasus Provinsi Jawa Tengah*", (Skripsi, Program Sarjana S1, Universitas "Diponegoro," Semarang, 2011), 48-50

sebaliknya terjadi bilamana investasi pemerintah dan swasta yang masuk ke suatu daerah ternyata lebih rendah.[51]

Menurut Harrod-Domar yang ditulis pada buku Subandi (2012), terdapat korelasi positif antara tingkat investasi dengan laju pertumbuhan ekonomi, sehingga dengan kurangnya investasi di suatu daerah membuat pertumbuhan dan tingkat pendapatan perkapita masyarakat di daerah tersebut rendah.[52]

Menurut Hirschman yang ditulis dalam buku Sadono Sukirno (2006) sampai dimana suatu Negara berkembang mampu melaksanakan pembangunan ditentukan oleh kesanggupannya untuk melaksanakan pembentukan modal.[53]

**a. Teori Gunnar Myrdal Mengenai Dampak Balik**

Menurut Gunnar Myrdal yang ditulis dalam buku Jhingan (2012) bahwa pembangunan ekonomi menghasilkan suatu proses sebab-menyebab sirkuler yang membuat si kaya mendapat keuntungan semakin banyak, dan mereka yang

---

[51]Sjafrizal, *Ekonomi Regional, Teori Dan Aplikasi* (Padang: Baduose Media, 2008), 120

[52] Subandi, *Ekonomi Pembangunan* (Bandung: Alfabeta, 2012), 134

[53] Sadono Sukirno, *Ekonomi Pembangunan, Proses, Masalah, dan Dasar Kebijakan* (Jakarta: Kencana, 2006), 290

tertinggal di belakang menjadi semakin terhambat. Dampak balik (*backwasb effects*) cenderung memperbesar dan dampak sebar (*spread effects*) cenderung mengecil. Secara kumulatif kecenderungan ini semakin memperburuk keimpangan internasional dan menyebabkan ketimpangan ragional di antara Negara-negara terbelakang.

Di Negara terbelakang, proses kumulatif dan sirkuler, juga dikenal sebagai "lingkar setan kemiskinan", berjalannya menurun dan, karena tak teratur, menyebabkan meningkatnya ketimpangan. Gunnar Myrdal yakin bahwa "pendekatan teoritis yang kita warisi" tak cukup menyelesaikan problem ketimangan ekonomi tersebut. "Teori pandangan internasional dan, tentu saja, teori ekonomi secara umum, tidak pernah disusun untuk menjelaskan realitas keterbelakangan dan pembangunan ekonomi."[54]

Asal ketidak merataan ragional dalam suatu Negara berakar pada dasar noneknomi. Ketimpangan ragional berkaitan dengan erat dengan system kapitalis yang

---

[54] Jhingan, *Ekonomi Pembangunan Dan Perencanaan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 211

dikendalikan oleh motif laba. Motif laba inilah yang mendorong berkembangnya pembngunan terpusat di wilayah-wilayah yang memiliki harapan-laba tinggi, sementara wilayah-wilayah lain tetap terlantar. Penyebab gejala ini, peranan bebas kekuatan pasar, yang cenderung memperlebar ketimbang mempersempit ketimpangan ragional.

Gunnar Myrdal juga mengemukakan bahwa perpindahan modal juga cenderung meningkatkan ketimpangan ragional. Di wilayah maju, permintaan yang meningkat akan merangsang investasi yang pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan dan menyebabkan putaran kedua investasi dan seterusnya. Lingkup investasi yang lebih baik pada sentra-sentra pengembangan dapat menciptakan kelangkaan modal di wilayah terbelakang.[55]

[55] Jhingan, *Ekonomi Pembangunan Dan Perencanaan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 212-213

## B. Konsep Teori Pertumbuhan Ekonomi, Investasi Swasta Dan Ketimpangan Pembangunan Wilayah Dalam Islam

### 1. Teori Pertumbuhan Ekonomi Dalam Islam

Banyak ahli ekonomi maupun ahli fikih yang memberikan perhatian terhadap pertumbuhan ekonomi yang menjelaskan bahwa maksud pertumbuhan ekonomi merupakan aktivitas produksi saja. Lebih dari itu pertumbuhan ekonomi merupakan aktivitas menyeluruh dalam bidang produksi yang berkaitan erat dengan keadilan distribusi. Pertumbuhan bukan hanya persoalan ekonomi, melainkan aktivitas manusia yang ditunjukan untuk pertumbuhan dan kemajuan sisi material dan spiritual manusia.

Beberapa pemahaman pokok mengenai pertumbuhan ekonomi yang dilihat dari perspektif Islam di antaranya mengenai batasan tentang persoalan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi dalam perspektif Islam tidaklah sama dengan yang dianut oleh kapitalis, dimana yang dimaksud dengan persoalan ekonomi yaitu persoalan kekayaan dan minimnya sumber-sumber kekayaan. Perspektif Islam menyatakan bahwa itu

sesuai dengan kepastian yang telah disediakan oleh Allah untuk memenuhi kebutuhan manusia yang ditunjuk untuk mengatasi persoalan kehidupan manusia.

Dari tujuan pokoknya, Islam tidak melihat pertumbuhan kekayaan sebagai sesuatu yang terpisah dengan cara distribusinya dan tuntunanya realisasi keadilan sosial. Di sisi lain, islam mendorong agar produk masyarakat mampu memenuhi kebutuhan pokok semua anggotanya dengan sejumlah komoditas yang memang diperlukan dalam tingkat berimbang bagi keseluruhan untuk mendapatkannya.[56]

Tariqi menguraikan mengenai beberapa karakteristik dalam pertumbuhan ekonomi Islam, sebagai berikut:

a. Serba Meliputi

Islam melihat bahwa pertumbuhan lebih dari sekedar materil dan memiliki tujuan yang lebih universal dibandingkan dengan orientalis terbatas yang ingin dicapai oleh system-sistem kontemporer yaitu untuk menciptakan keadilan sosial.

---

[56] Nurul Huda dkk, *Ekonomi Pembangunan Isalam* (Jakarta: Prenandamedia Grup, 2015), 124-125

b. Berimbang

Pertumbuhan ekonomi Islam tidak hanya diorientasikan untuk menciptakan pertambahan produksi, namun ditunjukkan berlandaskan keadilan distribusi sesuai firman Allah QS. Al-Maaidah (5):8 :

.....ٱعۡدِلُواْ هُوَ أَقۡرَبُ لِلتَّقۡوَىٰۖ....

*"……berbuat adilah kamu sesungguhnya hal itu yang paling dekat dengan ketaatan…."*

Keadilan dilakukan dengan memberlakukan ebaikan bagi semua manusia dalam kondisi apa pun. Tujuan pertumbuhan ekonomi dalam islam yaitu adanya kesempatan semua anggota masyarakat untuk mendapatkan kecukupan, buan kekurangan.

c. Realitis

Realitas adaalah suatu pandangan terhadap permasalahan sesuai kenyataan. Sifat ini realisasi dalam bidang pertumbuhan ekonomi menjelaskan bahwa islam melihat persoalan ekonomi

dan sosial yang mungkin terjadi di masyarakat islam dengan tawaran solusi yang juga realisasi.[57]

d. Keadilan

Islam dalam menegakkan hokum-hukumnya didasarkan atas landasan keadilan di antara manusia.Allah telah memerintahkan untuk berbuat adil dalam banyak ayat Al-Qur'an.Allah berfirman dalam QS. An-Nahl (16) ayat 90:

إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُ بِٱلۡعَدۡلِ وَٱلۡإِحۡسَٰنِ وَإِيتَآيِٕ ذِي ٱلۡقُرۡبَىٰ وَيَنۡهَىٰ عَنِ ٱلۡفَحۡشَآءِ وَٱلۡمُنكَرِ وَٱلۡبَغۡيِۚ يَعِظُكُمۡ لَعَلَّكُمۡ تَذَكَّرُونَ (٩٠)

*"sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dalam berbuat kebajikan, memberi kerabat, dan Allah melarang dari berbuat keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepada kamu agar kamu mendapat pelajaran."*

e. Bertanggung Jawab

Landasan adanya tanggung jawab sebagai salah satu fondasi paling penting diungkapkan secara jelas dan gambling dalam syariat islam.

---

[57] Nurul Huda dkk, *Ekonomi Pembangunan Isalam* (Jakarta: Prenandamedia Grup, 2015), 126

f. Mencangkupi

Islam tidak hanya menetapkan adanya karakteristik tanggung jawab, namun tanggung jawab itu haruslah mutlak dan mampu mencangkup realisasi kecukupan bagi semua manusia.

g. Berfokus Pada Manusia

Karakter ini sesuai dengan posisi manusia yang merupakan duta Allah di muka bumi dan inilah yang mencirikan tujuan pengaruh pertumbuhan ekonomi dalam islam. Pertumbuhan dalam islam ditunjukkan untuk menciptakan batas kecukupan bagi seluruh warga Negara agar ia terbebas dari segala bentuk penghambaan, baik dalam bidang finansial maupun bidang hukum, kecuali hanya penghambaan kepada Allah.[58]

**2. Teori Investasi swasta Dalam Islam**

Di dalam Ekonomi, investasi pribadi dibagi menjadi dua cara: investasi aktif, dimana seseorang atau lebih menetapkan modal mereka dalam suatu proyek, mengatur proyek tersebut

[58] Nurul Huda dkk, *Ekonomi Pembangunan Isalam* (Jakarta: Prenandamedia Grup, 2015), 127

bersama dan menikmati hasil-hasil dari tenaga kerja dan modal mereka sendiri; dan investasi pasif, dimana investor menyediakan modal dan menerima *retrun* (penghasilan) tetapi tidak terjun secara jauh dalam proyek itu. Dalam pandangan ekonomi islam dua opsi tadi di atas dimasukkan dalam katagori investasi ribawi dan berarti mendapatkan *income* riba dan oleh karena itu dilarang sementera opsi terakhir dan investasi aktif dibolehkan dalam islam. [59]

Dalam investasi syariah, ada dua hal lain yang turut berperan dalam investasi. Investasi syariah tidak hanya berorientasi pada persoalan duniawi sebagaimana yang dikemukakan para ekonom seuler. Ada unsur lain yang sangat menentukan berhasil tidaknya suatu investasi di masa depan, yaitu ketentuan dan kehendak Allah. Allah berfirman dalam Q.S Luqman Ayat 34:

إِنَّ ٱللَّهَ عِندَهُۥ عِلۡمُ ٱلسَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ ٱلۡغَيۡثَ وَيَعۡلَمُ مَا فِي ٱلۡأَرۡحَامِۖ وَمَا تَدۡرِي نَفۡسٞ مَّاذَا تَكۡسِبُ غَدٗاۖ وَمَا تَدۡرِي نَفۡسُۢ بِأَيِّ أَرۡضٖ تَمُوتُۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرُۢ(٣٤)

*"Sesungguhnya hanya disisi Allah ilmu tentang hari kiamat, dan Dia yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa*

[59] Ismail, *Keuangan Dan Investasi Syariah sebuah Analisis Ekonomi* (Jakarta: Sketsa,2010), 194

*yang ada dalam rahim. Dan tidak ada seoraang pun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan dikerjakannya besok. Dan tidak ada seoraang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Mengenal."*

Islam memadukan antara dimensi dunia dan akhirat. Setelah kehidupan dunia yang fana, ada kehidupan akhirat yang abadi. Setiap muslim harus berupaya meraih kebahagian di dunia dan akhirat. Kehidupan dunia hanyalah sarana dan masa yang harus dilewati untuk mencapai kehidupan yang kekal di akhirat.

Konsep di atas bukanlah hal yang bisa diremehkan, dimana antara urusan dunia dengan akhirat tidak bisa dipisahkan. Sehingga memberikan pengaruh yang sangat besar, termasuk salah satunya pada urusan ekonomi (*muamalah*). Oleh karena itu, investasi sebagai salah satu bahasan yang ada pada ilmu ekonomi, tentunya juga memiliki aturan-aturan yang sesuai syariat agama islam.[60]

---

[60]Muhammad Alfian, "Teori Investasi" <http://googleweblight.com/?lite_url=http: //ianekis. wordpress.com/2013/12/28/teori-investasi/&ei> (diunduh tanggal 16 Desember 2017)

Menurut Metwally yang ditulis dalam buku Nurul Huda (2008) bahwa investasi di Negara-negara penganut ekonomi islam dipengaruhi oleh 3 (tiga) faktor, yaitu:

1. Ada sanksi terhadap pemegang aset yang kurang atau tidak produktif (*hoarding idle asset*),
2. Dilarang melakukan berbagai bentuk spekulasi dan segala macam judi,
3. Tingkat bunga untuk berbagai pinjaman sama dengan nol.

Sehingga seorang muslim boleh memilih tiga alternative atas dananya, sebagai berikut:

a. Memegang kekayaannya dalam bentuk uang kas (*idle cash*),
b. Memegang tabungannya dalam bentuk asset tanpa berproduksi seperti deposito, *real estate*, permata,
c. Menginvestasikan tabungannya (seperti memiliki proyek-proyek yang menambah persedian capital nasional).[61]

[61] Nurul Huda, Mustafa Edwin Nasution, Handi Risza Idris, Ranti Wiliasih, *Ekonomi Makro Islam Pendekatan Teoritis* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2008), 49

### 3. Teori Ketimpangan Pembangunan Wilayah Dalam Islam

Ketimpangan pembangunan antar wilayah merupakan aspek yang umum terjadi dalam kegiatan ekonomi suatu daerah. Melihat ketimpangan pembangunan wilayah dalam suatu Negara atau suatu daerah bukanlah hal yang mudah karena hal ini dapat menimbulkan debat yang berkepanjangan.[62]

Dalam perspektif ekonomi islam menyatakan munculnya konsep pemikiran tentang keadilan distributive dilatar belakangi oleh kenyataan bahwa teori-teori ekonomi yang telah ada tidak mampu mewujudkan ekonomi global yang berkeadilan dan berkeadaban. Yang terjadi justru dikotomi antara kepentingan induvidu, masyarakat, dan Negara, dan hubungan antar negara. Selain itu teori ekonomi yang ada tidak mampu menyelesaikan masalah kemiskinan dan ketimpangan. Juga tidak mampu menyelaraskan hubungan antar regional disuatu Negara, antara Negara-negara di dunia, terutama antara Negara-negara maju dan Negara-negara

[62]Sjafrizal, *Ekonomi Regional, Teori Dan Aplikasi* (Padang: Baduose Media, 2008), 107

berkembang dan Negara-negara terbelakang. Lebih parah lagi yaitu terlalaikannya pelestarian sumber daya alam.

Secara umum, Islam mengarahkan mekanisme berbasis moral spiritual dalam pemeliharaan keadilan sosial pada setiap aktivitas ekonomi. Latar belakangnya karena ketidak seimbangan distribusi kekayaan merupakan hal yang mendasari hampir semua konflik induvidu maupun sosial. Upaya pencapaian manusia akan kebahagian, membimbing manusia untuk menerapkan keadilan ekonomi yang dapat menyudahi kesengsaraan di muka bumi ini. Hal ini akan sulit dicapai tanpa adanya keyakinan pada prinsip moral dan sekaligus kedisiplinan dalam mengimplementasikan konsep moral tersebut. Ini merupakan fungsi dari menerjemahkan konsep moral sebagai faktor endogen dalam perekonomian, sehingga etika ekonomi menjadi hal yang sangat membumi untuk dapat mengalahkan setiap ketimpangan.[63]

Menurut Jawaharlal Nehru (2015) yang tampaknya menjadi sosok pembela teguh keadalian sosialekonomi

---

[63] Nurul Huda dkk, *Ekonomi Pembangunan Isalam* (Jakarta: Prenandamedia Grup, 2015), 35-36

membolehkan ketidakmerataan ekonomi yang harus bertambah di India seraya berkata, “untuk skala tertentu, hal itu tidak dapat dihindari dalam sebuah perekonomian yang sedang berkembang.” Sebagian ekonomi muslim juga ikut-ikutan bergabung dalam kereta, padahal sudah begitu jelas penekanan islam pada keadilan sosioekonomi. Mereka menerima pandangan kaum Sekularis da Darwinis sosial bahwa menikmati keadilan sosioekonomi adalah sama dengan menikmati barang mewah yang hanya dicapai oleh Negara-negara maju saja. Dr. Mahboobul Haq yang kemudian menjadi materi keuangan dan perencanaan Pakistan menulis, “ Negara-negara terbelakang harus secara sadar menerima suatu falsafah pertumbuhan dan membuang jauh-jauh semua gagasan tentang distribusi pendapatan dan Negara kesejahteraan. Harus diakui bahwa semua ini adalah barang mewah yang hanya dinikmati oleh Negara-negara maju.[64]

[64] Umer Chapra, *Islam dan Pembangunan Eonomi* (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), 37

## C. Tinjauan Terhadap Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian tentang ketimpangan di berbagai negara telah dilakukan oleh sejumlah penelitian dengan daerah dan periode waktu yang berbeda pula, antara lain:

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Haris Hidayat (2014) yang berjudul "Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Investasi, dan IPM Terhadap Ketimpangan Pendapatan Antar Daerah Di Provinsi Jawa Tengah". Dalam penelitian ini menggunakan metode panel data, hasil penelitiannya menunjukkan bahwa antara pengaruh varibel Pertumbuhan Ekonomi dan variabel IPM berpengaruh signifikan dan positif terhadapa ketimpangan, sedangkan variabel Investasi berpengaruh negative dan signifikan terhadap ketimpangan.[65]

Penelitian yang dilakukan oleh Barika (2018) yang berjudul "Analisis Ketimpangan Pembangunan Wilayah Kabupaten/Kota Di Provinsi Bengkulu". Yang bertujuan

---

[65] Muhammad Haris Hidayat, "*Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Investasi, dan IPM Terhadap Ketimpangan Pendapatan Antar Daerah di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2012*," (Skripsi, Program Sarjana, Universitas "Diponegoro," Semarang, 2014)

mengetahui pengaruh Pengeluaran Pemerintah, Pertumbuhan Penduduk, dan Investasi Swasta Terhadap Ketimpangan Pembangunan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis regresi, analisis klassen typology pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan indeks wiliamson. Dalam penelitiannya menunjukkan bahwa Pertumbuhan Penduduk dan Investasi Swasta berpengaruh signifikan dan positif terhadap Ketimpangan, sedangkan Pengeluaran Pemerintah tidak berpengaruh signifikan.[66]

Penelitian yang dilakukan oleh Budiantoro Hartono (2008) yang berjudul "Analisis Ketimpangan Pembangunan Ekonomi Di Provinsi Jawa Tengah". Yang bertujuan mengetahui pengaruh Investasi Swasta Perkapita, Ratio Angkatan Kerja, dan Alokasi Dana Pembangunan Perkapita terhadap ketimpangan pemangunan ekonomi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah data runtut waktu. Dalam penelitiannya menunjukkan bahwa pengaruh investasi

[66] Barika, "Analisis Ketimpangan Pembangunan Wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu," :*Jurnal Ekonomi dan Perencanaan Pembangunan*, Vol : 04. NO. 03, (Januari-Juni 2012)

swasta perkapita, rasio angkatan kerja dan alokasi dana pembangunan perkapita berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pembanguan ekonomi.[67]

[67] Budiantoro Hartono, "Analisis Ketimpangan Pembangunan Ekonomi Provinsi Jawa Tengah", (Tesis Magister, Program Magister Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan, "Universitas Diponegoro," Semarang, 2008)